

KPK Perpanjang Penahanan Dua Eks Anggota DPRD Jabar

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Keduanya merupakan tersangka kasus suap terkait pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

"Tim penyidik KPK telah melakukan perpanjangan penahanan kedua selama 30 hari kedepan terhadap dua tersangka," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (13/7).

"Atas nama ABS (Ade Barkah Surahman) dan SA (Siti Aisyah Tuti Handayani)," ucap Ipi. Ipi mengatakan, perpanjangan penahanan tersebut berlaku mulai Rabu (14/7) sampai dengan 12 Agustus 2021.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Kemudian, KPK menetapkan empat tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta. Empat tersangka tersebut yakni Bupati Indramayu

periode 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omsaryah. Selain itu, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

Kasus tersebut kemudian dikembangkan. Pada Agustus 2020, KPK menetapkan tersangka lain yakni Abdul Rozaq Muslim yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.

Abdul Rozaq saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PPN Bandung. Dalam kasus ini, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani disangka

melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. **mei**

IDN/ANTARA



OJK TARGET 10 JUTA ORANG TERVAKSIN COVID-19

Sejumlah peserta mengantar untuk disuntik vaksin COVID-19 pada Vaksinasi Kepada Pelaku Industri Jasa Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Selatan di gedung Sekolah Kusuma Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (13/7). OJK bekerja sama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi kepada 10 juta orang hingga akhir Desember 2021.

Soal Sanksi terhadap Dua Penyidik, Dewas Dinilai Jadi Alat Pembeneran Kealpaan KPK

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah menjadi alat pembeneran atas kealpaan KPK untuk membeberkas koruptor. Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, atas sanksi yang diberikan oleh Dewas kepada dua penyidik KPK Mohammad Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga.

Kedua penyidik itu dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik berupa perundungan dan pelecakan kepada salah satu saksi dalam pemeriksaan perkara bansos Covid-19 bernama Agusti Yogaswara alias Yogas. "Secara awal sudah dicurigai bahwa Dewas akan digunakan menjadi alat pembeneran dari kealpaan KPK dan koruptor," kata Feri, Selasa (13/7).

"Dalam kasus Praswad dan Prayoga tersebut misalnya, orang tidak fokus kepada persoalan pokok bahwa mereka berdua sedang menanganai kasus maha besar yaitu korupsi bansos," ucap Feri.

Akibat keputusan tersebut, kata Feri, publik jadi membicarakan proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik atau penyidik KPK yang dinilai melanggar prosedur etik tersebut. Padahal, menurut dia, Dewan Pengawas tidak mendapatkan keterangan dan bukti-bukti pemeriksaan secara utuh.

"Keterangan dan alat bukti yang dipahami Dewas sepotong-sepotong, sehingga kesan bahwa

ada isu yang lebih besar sedang ditutupi terasa sekali," ucap Feri.

Dewan Pengawas KPK menyatakan dua penyidik KPK Praswad Nugraha dan Nur Prayoga terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan tersebut dinyatakan dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Harjono dan dua Anggota Majelis Albertina Ho dan Syamsuddin Haris pada Senin (12/7).

"Mengadili, menyatakan para terpekerja I Mohammad Praswad Nugraha, II M Nur Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecakan terhadap pihak lain," kata Ketua Majelis Sidang Dewas, Harjono dalam konferensi pers, Senin (12/7).

Dalam sidang etik tersebut, Harjono juga menyatakan kedua penyidik KPK itu diberi sanksi yang terdiri dari sanksi ringan dan sedang. Praswad Nugraha diberi sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan, Nur Prayoga diberi sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan.

Adapun hal memberatkan keduanya adalah mereka sebagai penyidik telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Sedangkan hal meringankan yaitu kedua penyidik mengakui terus terang akan perbuatannya.

Bahkan, penyidik Nur Prayoga menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Harjono menyebut, putusan yang dibacakan dalam sidang Dewas tersebut telah melalui berbagai proses mulai dari mendengar saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan hingga meminta keterangan ahli yang diajukan. Adapun pelaporan terhadap Praswad Nugraha dan Nur Prayoga ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan intimidasi dilakukan sendiri oleh saksi yang mengalami intimidasi yaitu Agusti Yogaswara alias Yogas. **han**

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRARAYA PERKASA ABA01 (dalam Likuidasi), berkedudukan di Kota Medan, tanggal 13 Juli 2021, nomor 19, yang dibuat oleh Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran/Likuidasi Perseroan;
2. Menunjuk Tn. E Dwi Iryadi, SH sebagai likuidator;
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset dan segala kewajiban Perseroan.
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:
Tn. E Dwi Iryadi, SH
Multivision Tower 12th floor,
Jl. Kuningan Mulla Kav. 9B
Guntur, Setiabudi, Kuningan
Jakarta Selatan 12980
Medan, 14 Juli 2021
Likuidator

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS ('SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS')
Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 10 Juni 2021, kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS.
Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS serta pihak-pihak yang berkepentingan.
SYAILENDRA Jakarta, 14 Juli 2021
Manajer Investasi
SYAILENDRA DANA EKUITAS DINAMIS
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

PENURUNAN MOBILITAS WARGA DI PPKM DARURAT JAWA BALI

Petugas gabungan memeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) milik pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (13/7). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut mobilitas masyarakat menurun 10 sampai 15 persen dalam seminggu pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, sementara Pemerintah menargetkan mobilitas berkurang hingga 20 persen.

Jokowi kepada 700 Perwira Remaja TNI-Polri, Jaga Pancasila dari Gempuran Ideologi Luar

Jokowi ingin perwira remaja TNI-Polri menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia, memegang teguh kode etik perwira dan menjunjung kehormatan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada perwira remaja TNI-Polri untuk melindungi Pancasila dari gempuran gelombang ideologi dari luar. Selain itu, keduanya juga harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut disampaikan Presiden saat melantik dan mengambil sumpah 700 orang calon perwira TNI-Polri pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) 2021, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/7).

"Tanggung jawab saudara-saudara sangat besar, saudara-

saudara harus melindungi Pancasila dari gempuran gelombang ideologi dari luar, saudara harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi antarbangsa," ucap Jokowi sebagaimana dilihat dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga ingin perwira remaja TNI-Polri menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia, memegang teguh kode etik perwira dan menjunjung kehormatan. "Pelihara kekompakan antarsesama perwira TNI dan Polri dengan tetap menghormati fungsi dan tugas masing-

masing dan melangkahlah ke gelanggang pengabdian dengan tegar dan optimisme dan penuh rasa percaya diri," kata Kepala Negara.

Jokowi meminta agar perwira remaja TNI-Polri harus mengikuti perkembangan zaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di dunia militer misalnya, strategi dan taktik peperangan di era modern harus dipahami dengan baik.

Lalu di dunia kepolisian harus semakin canggih dalam membeberkas kejahatan serta menggunakan instrumen teknologi informasi untuk menegakkan hukum.

"Sekali lagi ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada mental dan karakter yang tangguh, yang tanggap, cepat dan cerdas, ada karakter kebangsaan yang kokoh penjaga NKRI dan penjaga Pancasila sejati," ucap Jokowi.

Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19 di Sosmed

JAKARTA (IM) - Orang yang sudah vaksin Covid-19 akan mendapatkan sertifikat setelah menerima baik dosis pertama maupun dosis kedua. Sertifikat ini awalnya tidak berbentuk cetakan. Tetapi kini, dapat diakses secara mudah melalui aplikasi dan laman situs Peduli Lindungi (pedulilindungi.id).

Sertifikat berwujud digital diantisipasi untuk meminimalisir pemalsuan. Masyarakat pun dapat mengunduh sertifikat dan aplikasi sudah tersedia di Playstore ataupun App Store. Lantas, apa saja dan sejauh mana kegunaan dari sertifikat ini?

Berikut beberapa fakta menarik terkait penggunaan sertifikat vaksinasi covid-19:

Dilansir dari infeksioemergingkemkes.go.id, E-HAC atau Electronic-Heart Alert Card merupakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan versi modern. Sistem ini dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, untuk memonitor lalu lintas kedatangan penumpang ke dan dari Indonesia melalui pintu gerbang pelabuhan laut maupun bandara.

Dalam kaitannya dengan penyebaran virus covid-19, sistem ini dirancang untuk mengurangi resiko negara

Indonesia terhadap dampak penularan penyakit/virus ini. Dilansir dari berbagai sumber, Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sertifikat akan terintegrasi dengan sistem E-HAC yang berkaitan dengan pelaku perjalanan, serta disertai dengan kode QR untuk bisa dilihat di data base.

Walaupun telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 No 7 Tahun 2021 bahwa sejumlah tes covid-19 masih dijadikan sebagai syarat utama perjalanan domestik/internasional, namun di masa PPKM Darurat sertifikat vaksin covid-19 juga dapat dipakai sebagai syarat ini.

Setiap masyarakat yang bepergian diwajibkan untuk melampirkannya, dan berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama), dengan tetap menunjukkan hasil negatif tes.

Namun, wacana sertifikat vaksin yang bisa menjadi syarat perjalanan untuk seterusnya masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut, karena menunggu

populasi penduduk Indonesia yang divaksin mencapai 30-40%. Selain itu, dibutuhkan pula kajian mendalam tingkat efektivitas vaksin Covid-19 terhadap kekebalan tubuh.

Terdapat rencana dari Menkes untuk menggunakan sertifikat vaksinasi yang akan diintegrasikan ke standar protokol kesehatan yang baru. Kabarannya, sertifikat ini dapat dipakai sebagai syarat baru untuk bisa menghadiri atau menyelenggarakan acara-acara besar seperti acara keagamaan, pertemuan keluarga, konser, makan bersama, dan lainnya. Terlebih lagi, seluruh penerima bantuan pemerintah harus mempunyai sertifikat ini, termasuk dalam pengurusan administrasi kependudukan yang meminta masyarakat untuk menunjukkan sertifikat.

Demi melindungi data pribadi masing-masing penduduk, masyarakat yang telah vaksin diminta tidak membagikan atau mengunggah sertifikat vaksinasi covid-19 ke media sosial. Hal itu karena sertifikat memuat kode QR yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, NIK, dan tanggal lahir peserta vaksinasi. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah orang lain mengakses data tersebut. **mei**

Abu Janda Sebut Virus Covid-19 Varian Baru Hancurkan Mentalnya

JAKARTA (IM) - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mengaku bahwa virus Corona varian baru benar-benar menghancurkan mentalnya. Ia mengatakan, Covid-19 varian baru itu dapat bergejala tiga hal yaitu, batuk, demam tinggi dan menggigil kedinginan.

Demikian testimony yang disampaikan Abu Janda soal gejala yang dirasakannya setelah terpapar Covid-19 varian Delta kepada netizen. "Varian baru, dia bisa serang tiga bareng-bareng demam tinggi, menggigil kedinginan hebat, dan batuk. Tulang terasa remuk redam meluluh tulang, berdin pun enggak bisa, pikir pun enggak bisa. Tenaga kita habis hanya dipake buat menahan serangannya sehari-hari," kata Abu Janda dengan tangan masih diinfus, seperti dikutip dari akun instagramnya, Selasa (13/7).

Aspek lainnya yang dirasakan Abu Janda ialah, Covid-19 memberinya harapan palsu untuk sembuh. Saat dirinya berpikir serangan itu telah melewati satu hingga dua hari dan sudah merasa baik, namun serangan kembali datang seperti awal di hari ke tujuh. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan perawatan intensif di ICU Mayapada.

"Kita pikir kita sudah minum obat-obatan yang tepat, kita pikir kita sudah menuju sehat. Akan tetapi serangan itu datang lagi, tubuh drop lagi kembali ke awal dan itu berulang tujuh hari masa isoman saya di rumah, enak (membai) drop lagi, enak drop lagi. Benar-benar menghancurkan mental, menghancurkan semangat untuk berjuang makanya saya nyerah saya ke IGD," jelasnya.

Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk selalu jaga protokol

kehatan (prokes). "Pesen gua sama temen-temen cuma please come stay safe," pesannya.

Pacar Positif Covid-19

Di tengah kondisi sakit, Abu Janda harus menerima kabar tak menyenangkan dari sang kekasih, Wynona Riesa. Melalui akun Instagramnya, Abu Janda mengabarkan bahwa Wynona jatuh sakit. Dia membagikan potret perempuan berdarah Indonesia-Inggris itu tengah terbaring lemah dengan mengenakan kompres demam dan masker.

"Banyak yang tidak tahu perempuan ini menderita gara-gara saya. Dia orang terakhir yang saya jumpai sehari sebelum saya ambruk terpapar," tulis Abu Janda, dikutip pada Selasa (13/7).

Tak diketahui sakit apa yang diderita Wynona. Yang jelas, Abu Janda merasa bersalah ketika dia tak bisa ikut merawat sang kekasih karena dia sedang dalam masa pemulihan covid-19.

"Hancur hati dengar dia dirawat mamanya tanpa kuasa berbuat apa-apa karena saya sedang tumbang isoman. Daya penalaran covid ini memang bukan kaleng-kaleng. makanya saya sampe pandemi gini, stay safe gaes," tulisnya.

"Maafin aku nyusahin kamu @wynona_riese. Saya janji kalo saya keluar dari Rumah Sakit nanti, saya mau jagain anak bule ini... seumur hidupnya... kalo diizinkan emaknya," sambungnya.

Unggahan Abu Janda langsung ditanggapi sang kekasih. Melalui kolom komentar, Wynona mengaku kondisinya kini sudah membaik.

"Enggak apa-apa sayang, aku udah sembuh. Sekarang tinggal tunggu kamu penyembuhan," komentar Wynona. **mar**



IDN/ANTARA

PERPANJANGAN PENAHANAN SITI AISYAH TUTI HANDAYANI

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/7). Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan perpanjangan penahanan kedua selama 30 hari kedepan terhadap Siti Aisyah Tuti Handayani dalam perkara dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

PENGUMUMAN
Direksi PT 88SPARES EMARKETPLACE INDONESIA ("Perseroan"), dan Andreas Janssen ("AJ") dengan ini mengumumkan bahwa AJ berencana untuk mengambil alih mayoritas saham yang dimiliki oleh 88Spare Pte. Ltd. dan PT INC Metal Trading dalam Perseroan yang merupakan 99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Pengalihan saham di atas adalah pengalihan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 (2) Anggaran Dasar Perseroan.
Jakarta, 14 Juli 2021
1. Direksi PT 88Spare EMarketplace Indonesia
2. Andreas Janssen

ANNOUNCEMENT
The Board of Directors of PT 88SPARES EMARKETPLACE INDONESIA ("Company") and Andreas Janssen ("AJ") hereby announce that AJ plans to acquire majority shares owned by 88Spare Pte. Ltd. and PT INC Metal Trading in the Company being 99% of the total number of issued and paid up shares of the Company.
The above share transfer constitutes an acquisition of shares of the Company directly through the shareholder pursuant to Article 125 (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").
This announcement is made pursuant to Article 21 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association.
Jakarta, 14 July 2021
1. Board of Directors PT 88Spare EMarketplace Indonesia
2. Andreas Janssen